

Krisis Pangan di Afghanistan: Antara Ketergantungan Pada Bantuan dan Upaya Kemandirian Pangan

Ega Ananda Saidah Muharam,¹ Nur Isdah Idris²

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Makassar

Email: egasaidahmhrm@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 10 June 2025

Accepted: 17 June 2025

Published: 30 June 2025

Keywords:

Food Crisis;

Capability Approach;

Food Independence



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between international aid and political dynamics in Afghanistan, and to identify factors influencing food self-sufficiency in the country. This is because the food crisis in Afghanistan is a complex problem, influenced by various political, economic, social, and cultural factors. The Taliban's takeover of power worsened the food security system with repressive policies that limited community participation, especially women. This study uses a literature review approach with dependency theory and a capability approach as its analytical framework. The results found that foreign aid interventions are often accompanied by political interests, which exacerbate Afghanistan's dependence on external parties. This study also found that the success of food self-sufficiency in Afghanistan is highly dependent on systemic improvements within the country and expanding the community's capabilities to fulfill the basic right to food sustainably. This research contributes to the theoretical understanding of international aid dependency and local capacity development in the context of food security.

PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan negara berkembang dengan berbagai tantangan yang dihadapi seperti kemiskinan hingga infrastruktur, mereka telah hidup dalam krisis kemanusiaan terbesar di dunia dan diperparah oleh instabilitas politik yang berdampak pada aspek keamanan pangan di sana. Pasca perpindahan kekuasaan ke Taliban, sepertiga penduduk di Afghanistan menghadapi krisis pangan yang menjadi masalah sosial ekonomi paling serius yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan diperburuk oleh konflik domestik. Mengingat Afghanistan menjadikan agrikultur sebagai mata pencaharian, perubahan rezim menjadi faktor utama yang menghancurkan kemampuan bangsa untuk memenuhi hak-hak dasar dan upaya memperbaiki sistem kemandirian yang bila tidak ditangani lebih lanjut akan membawa krisis lain. Situasi krisis menempatkan masyarakat dalam situasi tidak aman, artinya salah satu aspek *human security* bermasalah sama seperti krisis pangan yang dihadapi Afghanistan.

Kedua hal tersebut memiliki korelasi yang berpengaruh pada stabilitas sosial sebab krisis pangan berdampak langsung pada keamanan manusia. Hubungan keduanya didasari oleh pemahaman bahwa terpenuhinya hak asasi manusia atas pangan yang layak merupakan hak dasar yang tidak bisa lepas dari diri seseorang (Hakiki, 2020). Hal itu karena, isu krisis pangan jauh lebih kompleks dari sekedar isu ketahanan pangan biasa, ia menjadi bagian utuh dari perlindungan dan pemenuhan hak manusia demi menjaga keberlanjutan hidup. Instabilitas yang terjadi di Afghanistan membuat banyak negara dan organisasi internasional menjulurkan tangan untuk membantu kembalinya stabilitas negara tersebut, membuat Afghanistan menjadi salah satu negara penerima bantuan terbesar di dunia. Afghanistan telah aktif menerima bantuan sejak pecahnya perang



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

saudara di tahun 1979-an, mundurnya Uni Soviet mengakibatkan pertikaian berbagai kelompok dalam negeri untuk mengambil alih tatanan pemerintah. Sejak saat itu negara di kawasan Asia Selatan tersebut diwarnai konflik berkepanjangan yang menyita perhatian. Amerika Serikat menginisiasi *American's Fund for Afghan Children* yang telah menggalang lebih dari \$1,5 juta untuk bantuan kemanusiaan.

Organisasi internasional juga ikut membantu isu krisis pangan di Afghanistan seiring dengan ketahanan pangan yang telah menjadi perhatian global. *Food Security and Agriculture Cluster* (FSAC) memberikan bantuan pangan yang ditargetkan untuk 15,8 juta masyarakat Afghanistan dan bertujuan untuk membangun ketahanan pangan jangka panjang di sana. Meskipun menerima banyak bantuan dalam aspek pangan, Afghanistan masih tak kunjung berada pada status aman dari krisis pangan. Di samping daripada kondisi ekonomi yang berdampak pada aktivitas agrikultur, mereka juga menghadapi instabilitas politik yang beriringan dengan kebijakan represif pemerintah seperti melarang keterlibatan perempuan dalam lapangan pekerjaan hingga pendidikan. Kebijakan ini menyebabkan turunnya produktivitas agrikultur serta pemasukan rumah tangga. Selain itu, penerimaan bantuan internasional selama beberapa dekade mulai memudahkan inisiatif masyarakat setempat untuk meningkatkan sistem kemandirian struktural dan memilih untuk bergantung pada investasi asing.

Masyarakat Afghanistan sendiri pada dasarnya mampu menciptakan harmonisasi di tengah konflik yang melanda wilayah. Upaya kemandirian terlihat melalui *Norwegian Afghanistan Committee* (NAC) yang menargetkan 59.250 individu untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga di tengah tantangan politik hingga lingkungan (Norwegian Afghanistan Committee, 2024). Hal ini menunjukkan masyarakat setempat bersama aktor pemberi bantuan mengupayakan kemampuan untuk memperbaiki keadaan yang sudah buruk dengan meninggalkan budidaya tanaman opium yang ilegal dan meningkatkan produktivitas di sana. Akan tetapi, upaya yang dilakukan tidak kunjung membawa banyak pengaruh dalam memperbaiki situasi krisis pangan di Afghanistan. Dinamika sistem bantuan internasional dan instabilitas politik domestik menjadi faktor terhambatnya situasi pangan yang aman di negara tersebut, sehingga krisis pangan dapat memburuk setiap waktu. Masyarakat Afghanistan bersama WFP terus berupaya untuk membenahi krisis pangan dengan pengembangan kapasitas pangan hingga menjadi fasilitator antara para negara penyalur bantuan dan Afghanistan. Melalui teori implementasi kebijakan organisasi internasional dan pendekatan manajemen, penelitian tersebut menjelaskan keberhasilan WFP mengatasi kelaparan dan meningkatkan penyaluran bantuan pada negara konflik tersebut.

Melalui data survei yang diperoleh dari *Food and Agriculture Organization*, penelitian menjelaskan bahwa situasi rumah tangga yang rentan dapat memperburuk keamanan pangan di Afghanistan. Dinamika masyarakat dan politik pasca berkuasanya Taliban menjadi kombinasi kompleks yang berpengaruh pada memburuknya krisis pangan di sana. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kondisi pangan Afghanistan tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan pangan tetapi oleh dinamika sosial dan politik. Berpacu pada kompleksitas faktor-faktor yang memperburuk krisis pangan di Afghanistan serta pemahaman dari penelitian terdahulu, penting untuk melakukan kajian yang mengidentifikasi akar penyebab krisis pangan di Afghanistan terus berlanjut sekalipun telah menerima banyak bantuan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengelaborasi perihal krisis pangan dunia Hermawan & Andrianyta, 2023). Kendati demikian, penelitian terdahulu masih fokus pada krisis pangan dunia dan belum spesifik pada wilayah Afganistan. Hal itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan



demikian, penelitian ini ingin menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab krisis pangan di Afghanistan dengan menelaah hubungan antara ketergantungan bantuan dan dinamika politik negara.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk memahami fenomena krisis pangan di Afghanistan secara mendalam, dengan fokus utama pada faktor-faktor yang memperburuk masalah ketahanan pangan serta upaya-upaya domestik untuk mencapai kemandirian pangan (Arianto & Simatupang, 2025). Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada eksplorasi dan pendeskripsian fenomena dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang isu yang dianalisis. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika politik, sosial, ekonomi, dan ketergantungan terhadap bantuan internasional berkontribusi pada krisis pangan yang terus berlangsung di Afghanistan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data utama. Studi literatur ini bertujuan untuk menggali informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti artikel jurnal, buku, laporan organisasi internasional, serta laman resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang masalah yang sedang dianalisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Habsy et al. (2023), studi literatur berperan penting dalam memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, serta menemukan landasan teoritis yang kuat. Teknik ini sangat efektif untuk mengkaji fenomena yang bersifat luas dan multidimensional, seperti krisis pangan di Afghanistan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interaksi antara bantuan internasional dan politik domestik. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. *Pertama*, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketahanan pangan di Afghanistan terancam, dengan menelaah literatur terkait ketergantungan terhadap bantuan internasional, kebijakan politik domestik yang represif, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan.

Kedua, menganalisis upaya-upaya domestik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Afghanistan untuk memperkuat kemandirian pangan, dengan menggali literatur yang membahas program pertanian, pemberdayaan masyarakat lokal, serta inisiatif berbasis komunitas yang dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar. Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor struktural yang memperburuk krisis pangan di Afghanistan, serta mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang mungkin lebih efektif dalam mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian ini ingin mengetahui bag memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas masalah ketahanan pangan di Afghanistan dan mencari solusi yang lebih tepat untuk jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Ketahanan Pangan di Afghanistan

Asia Selatan menjadi sebuah kawasan dengan dinamika yang menyita perhatian dunia. Konflik dan kekerasan telah lama lestari di kawasan tersebut menghasilkan instabilitas yang menjadi lebih buruk sebab Asia Selatan umumnya diisi oleh negara-negara berkembang dengan situasi politik dan ekonomi instabil. Sama seperti berbagai isu



yang tengah dihadapi Afghanistan, instabilitas politik yang akhirnya membawa pada situasi krisis pangan. Dalam laman resmi *World Food Programme* (2024) sebanyak 14,8 juta masyarakat Afghanistan mengalami kerawanan pangan akut. Laporan yang diterbitkan oleh *Security Council* (2025). juga menjelaskan betapa mengerikannya situasi di Afghanistan yang menghadapi krisis pangan. Dalam laporan yang sama juga menjelaskan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban membatasi pergerakan misi kemanusiaan di negara tersebut. Pembatasan terhadap akses, ekonomi yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, konflik yang mengganggu masuknya bantuan, hingga kelaparan membuat stabilitas di Afghanistan sulit di tegakkan. Selain itu, kondisi geografis Afghanistan yang cenderung kering membuat aktivitas pertanian juga terhambat.

Perubahan iklim berdampak langsung pada produktivitas pertanian yang membatasi akses rumah tangga pedesaan terhadap sumber daya pangan dan berdampak buruk pada keberlanjutan pangan di sana (Althoff, 2019). Pertanian tradisional menjadi aktivitas utama yang menunjang keamanan pangan dan dapat memperbaiki situasi krisis pangan yang dihadapi setiap rumah tangga. Akan tetapi, Afghanistan sendiri tengah menghadapi berbagai persoalan yang mengganggu proses mencapai keamanan pangan negara tersebut, hal ini meliputi kurangnya input pertanian hingga akses pasar untuk menjembatani aktivitas pertanian masyarakat (Samim et al., 2021). Bantuan untuk mendorong kemandirian pangan di Afghanistan telah lama hadir, salah satunya melalui program USAID yang berfokus membantu para petani yang dinilai memegang kunci penting pada kelangsungan pangan. USAID memberikan pemahaman terkait tata cara bertani di lahan kering dan memberikan bibit anggur sebagai modal awal untuk memperbaiki aktivitas agrikultur di sana. Meskipun cukup efektif untuk memperbaiki keadaan pertanian yang menjadi penunjang hidup masyarakat Afghanistan, bantuan ini masih tidak cukup efektif untuk mengatasi kelaparan dan krisis pangan di sana (USAID, 2022).

Akses terhadap pangan yang aman sulit dicapai apabila tidak hanya situasi rumah tangga yang masih rentan tetapi juga negara, seperti yang tengah di hadapi Afghanistan. Dinamika kepemimpinan Taliban menurunkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut yang sebelumnya telah berada di angka yang rendah, sebab tingkat pendidikan yang baik akan memungkinkan rumah tangga petani berada dalam kondisi pangan yang aman (Samim et al., 2021). Kelaparan dan malnutrisi yang dialami masyarakat Afghanistan menghambat produktivitas negara tersebut untuk mengembalikan keamanan pangan mereka. Peralihan otoritas ke tangan Taliban nyatanya memperparah situasi di sana membuat tidak hanya masyarakat lokal yang kesulitan untuk memperbaiki krisis tetapi juga menjadi hambatan bantuan internasional yang masuk ke Afghanistan. Krisis pangan yang terjadi di Afghanistan tidak hanya sebuah situasi kesulitan masyarakat terhadap akses dan keamanan pangan, tetapi mencakup keterkaitan antara instabilitas politik hingga sistem bantuan internasional yang diperparah oleh kepemimpinan Taliban. Tanpa perbaikan sistemik dan dukungan internasional yang berkelanjutan, upaya untuk mencapai keamanan pangan di Afghanistan akan terus menghadapi hambatan.

Analisis Penyebab Krisis Pangan

Afghanistan merupakan sebuah negara yang tatanan pemerintahannya dikuasai oleh kelompok gerakan islam bernama Taliban yang dibentuk oleh Mullah Mohammad Omar dengan ideologi islamis-Nasionalis. Kelompok ini muncul akibat perang saudara yang terjadi di Afghanistan pada tahun 1989 dan mendapatkan berbagai dukungan dari komunitas Pashtun membuat kelompok ini dapat menduduki beberapa wilayah di Afghanistan. Taliban berhasil mengalahkan pemerintah Afghanistan tanpa perlawanan,



kepemimpinan Taliban memicu berbagai masalah domestik yang akhirnya menyita perhatian internasional antara lain pembatasan hak perempuan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hingga pembunuhan dalam negeri. Kehadiran Taliban juga membawa respon dari Amerika Serikat dengan prinsip demokratis mereka yang menentang kekerasan dan penolakan kesetaraan oleh Taliban, membuat penarikan pasukan militer yang dilakukan Amerika Serikat memperparah situasi politik di negara tersebut. Konflik yang berimbas pada keamanan masyarakat menunjukkan bagaimana Taliban tidak cukup berkapabilitas untuk menduduki tatanan pemerintah.

Ideologi Deobandi Konservatif yang digabung dengan adat Pashtun yang dianut Taliban melahirkan banyak kebijakan kontroversial dalam pemerintahan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan keinginan masyarakat Afghanistan, tetapi juga dunia internasional. Gerakan yang dikira akan membawa perdamaian dari situasi instabil Afghanistan, ternyata berbanding terbalik dengan harapan sebagian orang disana. Taliban memperluas tujuan gerakan menjadi penguasaan penuh di Afghanistan yang akhirnya membawa pada tindakan kekerasan dan penegakan kebijakan berbasis islam yang bertentangan dengan ajaran. Situasi sosial Afghanistan berubah revolutif karena syariah Islam Taliban diterapkan dengan ketat begitu pula dengan seluruh aturan tradisional yang dirombak. Sementara kaum perempuan dilarang mengakses pendidikan dan pekerjaan, serta diharuskan bersama muhrim selama di luar ruangan, apabila perempuan tertangkap bepergian bersama bukan muhrim akan diberi hukuman mati.

Ketahanan pangan di Afghanistan memburuk selama masa kepemimpinan Taliban sehingga 93 persen rumah tangga mengalami kerawanan pangan, ini bertambah 13% dari keadaan di tahun 2021 (Saif-Nijat et al., 2023). Afghanistan juga pernah menjadi penghasil Opium terbesar dan budidaya ini menempati posisi penting dalam kerangka pertanian domestik. Namun, Afghanistan mendapatkan kecaman internasional akibat budidaya tanaman narkotika tersebut. Akibatnya, Taliban mengeluarkan kebijakan pelarangan budidaya Opium di Afghanistan yang menghasilkan dilema tersendiri mengingat bahwa aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan utama para petani akibat kondisi ekonomi yang buruk. Pelarangan ini mengakibatkan kenaikan harga pangan dan gangguan aktivitas ekspor impor yang akhirnya berdampak pada krisis pangan di Afghanistan. Pasca pelarangan diberlakukan, terjadi kerawanan pangan di daerah yang terdampak, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan melahirkan permasalahan bagi masyarakat dalam mengamankan makanan untuk keluarga dan diri sendiri (Jafarov & Singh, 2024).

Secara umum, selama kepemimpinan Taliban, Afghanistan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada produksi pertanian dan perbaikan gizi masyarakat. *Afghanistan Food Security and Nutrition Agenda* dirancang untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat sipil, meskipun begitu dalam penerapannya masih menghadapi banyak miskoordinasi antar sektor dan dipengaruhi oleh kebijakan bantuan luar negeri (Poole et al., 2018). Kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan di Afghanistan sebetulnya belum menunjukkan prospek yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai alasan mulai dari kurangnya peran sektor yang terlibat, hingga ketergantungan Afghanistan terhadap bantuan internasional membuat upaya kemandirian sulit di jalankan.

Kondisi politik di Afghanistan menunjukkan bagaimana negara berkembang sangat bergantung pada bantuan eksternal hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori dependensi. Politik domestik yang rentan melemahkan kapabilitas negara dalam menentukan arah kebijakannya, sehingga dapat dilihat dalam paragraf sebelumnya bahwa



kebijakan yang dikeluarkan oleh Afghanistan seperti program keamanan pangan dan pelarangan Opium didasari pada tekanan internasional alih-alih kebutuhan masyarakat lokal. Melalui teori yang sama, dapat dilihat bagaimana angka kelaparan di Afghanistan meningkat hingga setengah dari populasi negara tersebut pasca penarikan kepentingan Amerika Serikat dan pengalihan kekuasaan oleh Taliban. Campur tangan negara *core* seperti Amerika Serikat membuat Afghanistan kehilangan otonomi politik untuk menentukan pembangunan berdasarkan kondisi rakyatnya.

Melalui kacamata teori dependensi, instabilitas politik dan krisis pangan di Afghanistan disadari sebagai dampak dari ketergantungan bantuan yang menempatkan mereka dalam posisi terikat. Selanjutnya, Afghanistan tergolong sebagai *failed state* yaitu negara yang tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai pemerintah berdaulat termasuk keterbatasan legitimasi. Hal ini dapat dilihat dari konflik selama empat dekade dan krisis pangan yang tidak kunjung mendapatkan titik terang. Selain itu, ekonomi Afghanistan sendiri sudah sangat rentan bahkan sebelum Taliban mengambil alih. Kondisi ini akhirnya membawa perhatian internasional untuk memperbaiki keadaan di Afghanistan yang membawa mereka pada situasi ketergantungan. Menurut *Human Rights Watch* (2022) 75 persen ekonomi Afghanistan sebelum Agustus 2021 bergantung pada bantuan asing. Dalam laman yang sama juga menyatakan bahwa bantuan dari Bank Dunia juga digunakan untuk membayar gaji jutaan guru dan pekerja penting lainnya. Meski begitu, banyak negara dan komunitas internasional yang menghentikan bantuan mereka karena tidak dapat mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah. Hal tersebut menyebabkan hiperinflasi mata uang Afghanistan yang berdampak pada lonjakan tertinggi harga makanan dan memperburuk krisis pangan di sana.

Masih terdapat bantuan internasional yang bertahan di Afghanistan, salah satunya pendistribusian bantuan pangan dan penyediaan komunikasi dengan donatur oleh *World Food Programme*. Bantuan lain juga datang dari Jepang dengan tujuan peningkatan keamanan pangan bagi petani kecil dan rumah tangga peternak yang rentan. Kondisi yang didominasi oleh bantuan ini memperlihatkan inkompetensi Afghanistan dalam mengatasi krisis pangan dan menyorot lemahnya kapasitas ekonomi di sana. Negara ini juga tidak memperlihatkan fokusnya dalam memperbaiki krisis pangan melalui investasi pada bidang tersebut. Bank Dunia dalam laporannya (2015) menjelaskan bahwa sektor pertanian di Afghanistan menyumbang sekitar 25% PDB dan menjadi sumber kehidupan lebih dari 75% populasi, meskipun begitu perkembangan pada sektor ini terhambat akibat rendahnya investasi domestik. Dapat dikatakan Afghanistan semakin bergantung pada impor dan bantuan asing untuk pasokan pangan, sementara negara tersebut berpotensi menghasilkan bahan baku makanan secara independen, tetapi terhambat akibat keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

Afghanistan harus mulai meningkatkan investasi dalam sektor pertaniandomestik, upaya ini berdampak dalam memperbaiki krisis pangan di sana dan akan memperbaiki kondisi rumah tangga masyarakat dan membangun kemandirian pangan jangka panjang. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur hanya akan memperkuat ketergantungan terhadap bantuan internasional, yang sejalan dengan teori dependensi. Kondisi ekonomi Afghanistan yang terus bergantung pada bantuan internasional juga dapat dilihat dari sudut pandang *capability approach*. Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketergantungan terhadap bantuan dan kurangnya investasi domestik mempersempit ruang bagi individu untuk bekerja. Melalui pendekatan ini, ekonomi di Afghanistan bukan sekedar rendahnya pendapatan, tetapi tentang terbatasnya kebebasan nyata bagi masyarakat untuk menjalani



kehidupan yang penting bagi termasuk hak atas pangan dan pekerjaan. *Capability approach* menyoroti bagaimana aspek ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk hidup dengan layak, sehingga ketergantungan bantuan hanya memperburuk hal tersebut. Ideologi Deobandi yang ditegakkan Taliban telah melanggar hak asasi manusia dan memberikan kesenjangan gender. Kebijakan tersebut membatasi kebebasan hak atas perempuan hingga kekerasan yang menyebabkan kekacauan domestik.

Pembatasan yang diberlakukan tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi telah membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalani hidup dengan cara yang bermakna bagi mereka, hal yang sama juga mempengaruhi partisipasi perempuan dan anak-anak dalam konteks kehidupan dan sosial budaya (United Nations, 2023). Masyarakat Afghanistan seharusnya mampu untuk mengamankan pasokan makanan melalui kemampuan agrikultur, tetapi ini tidak dapat diterapkan mengingat minimnya akses terhadap bibit yang baik dan kurangnya pengetahuan atas budidaya tanaman. Kebijakan represif telah membatasi peran perempuan dalam sektor agrikultur di Afghanistan, padahal produktivitas agrikultur tidak dipengaruhi oleh gender. Perempuan memegang peran yang signifikan dalam produksi pangan terlebih pasca panen seperti menimbang hingga memastikan pasokan pangan yang cukup dalam rumah tangga dan peternakan (Osmani et al., 2022).

Pemerintahan Taliban hanya merampas hak para perempuan di Afghanistan untuk terhubung dengan kegiatan agrikultur yang akan membantu ekonomi dan pasokan pangan pada setiap rumah tangga. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas agrikultur juga dipengaruhi oleh minimnya angka literasi, sehingga situasi ini membuat terputus dengan peluang ekonomi dan kemampuan diri dalam praktik produksi pangan (Gul & Sail, 2023). Lembaga pendidikan mewakili otoritas negara, sehingga para pemberontak kerap menargetkan sekolah sebagai bentuk perlawanan terhadap negara dan media propaganda. Konflik yang terjadi di Afghanistan membuat Taliban memegang kendali pada sistem pendidikan dan memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarkan ideologi Deobandi konservatif. Taliban mengklaim bahwa kurikulum islam di sekolah sudah cukup, justru memberlakukan kontrol ketat terhadap perempuan alih-alih memperbaiki sistem pendidikan di sana, rezim ini menggunakan ketidakmampuan ekonomi domestik sebagai alasan memprioritaskan pendidikan laki-laki dan membatasinya pada perempuan. Meskipun tidak memiliki kebijakan nyata mengenai pembatasan pendidikan, angka kesempatan bersekolah dan partisipasi perempuan di Afghanistan masih sangat rendah.

Situasi ini membuat pendidikan berperan dalam merendahkan kualitas masyarakat melalui manipulasi sejarah dan menekankan budaya minoritas. Sistem pendidikan di negara konflik memerlukan atensi dan opini kritis sebab hal tersebut dapat di eksploitasi untuk tujuan ideologis dengan latar belakang instabilitas politik (Pherali & Sahar, 2018). Lemahnya pendidikan di Afghanistan membawa masyarakatnya pada situasi krisis pangan jangka panjang, dimana mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam membudidayakan potensi agrikultur yang dimiliki. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan krisis pangan di rumah tangga petani, sebab kepala rumah tangga pertanian dengan tingkat pendidikan rendah lebih mungkin mengalami krisis pangan (Samim et al., 2021). Penyediaan pendidikan yang layak akan memberikan informasi tentang produksi pertanian hingga tata cara pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, keterkaitan antara rendahnya pendidikan juga berimplikasi pada malnutrisi di negara tersebut, hal ini selaras dengan kurangnya



pengetahuan dasar para Ibu menyebabkan malnutrisi yang tinggi pada anak-anak (Mashal et al., 2008).

Pendidikan diperlukan, tidak untuk memperbaiki konflik yang dihadapi secara domestik tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup para rumah tangga di sana. Faktor sosial dan budaya ini menghambat terwujudnya keamanan pangan dan kemandirian dari bantuan internasional. Melalui *capability approach*, dapat dilihat bahwa krisis pangan di Afghanistan tidak semata persoalan kelaparan tetapi terbatasnya akses masyarakat atas aktivitas agrikultur. Situasi ini menghambat upaya kemandirian masyarakat dalam menghasilkan pangan, melalui pendekatan yang sama dapat dilihat bahwa pembatasan di kepemimpinan Taliban hanya berfokus pada pencegahan pelebaran konflik, ketika masyarakat sangat membutuhkan asupan gizi yang layak alih-alih pengalokasian dana pada aspek keamanan domestik. *Capability approach* meyakini bahwa keberfungsian individu diperoleh melalui pilihan yang dibuat, sehingga pendekatan ini berfokus pada kebebasan bagi setiap individu dalam menentukan kapabilitasnya (Bridges, 2023). Hal itu dikarenakan, *capability approach* dapat menekankan pentingnya memperluas kebebasan masyarakat Afghanistan untuk berpartisipasi dalam sistem pangan secara mandiri sebagai upaya jangka panjang dalam mengatasi krisis pangan yang dihadapi.

Peran dan Efektivitas Bantuan Internasional

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kondisi instabilitas Afghanistan membuat banyak bantuan internasional masuk guna membantu mengembalikan keamanan pangan. WFP sebagai organisasi internasional terus membersamai Afghanistan dalam menangani krisis pangan di sana, mereka menjadi penyelamat bagi masyarakat Afghanistan di tengah situasi darurat. WFP tidak hanya menjadi pendonor pangan, tetapi fasilitator bagi negara-negara pemberi bantuan. Menurut laporan WFP (2024) bantuan dengan total USD 81,9 juta yang diberikan WFP dipergunakan sebanyak 28% untuk membeli semua produk pangan lokal Afghanistan, mereka melakukan pendistribusian pangan langsung melalui penyaluran bahan pangan seperti gandum dan kacang-kacangan. Selain itu mereka bekerja sama dengan komite komunitas lokal untuk merekognisi situasi rumah tangga yang paling rentan, sehingga dapat dikatakan bahwa WFP senantiasa melibatkan masyarakat lokal dalam memberikan bantuan pangan agar berdampak signifikan (*World Food Programme*, 2019). Meskipun begitu, efektivitas dari pemberian bantuan ini masih terhambat, hal ini disebabkan oleh instabilitas Afghanistan yang membatasi pergerakan WFP hingga pemberian bantuan yang menyesuaikan dengan ketersediaan pasokan pangan menciptakan tantangan baru bagi organisasi internasional tersebut.

Selain organisasi internasional, Jepang memberikan bantuan sebanyak 7 juta dolar untuk meningkatkan persediaan pangan, mencegah malnutrisi, hingga mendukung program pemberian makanan di sekolah (*World Food Programme*, 2019). Laporan yang dirilis oleh *Food and Agriculture Organization* (2023) menjelaskan bantuan pangan yang diberikan Jepang dalam bentuk pendistribusian 150 ton benih gandum, FAO juga memberikan pelatihan budidaya gandum yang baik. *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA), memberikan bantuan dengan peningkatan kapasitas produksi pertanian lokal agar masyarakat dapat mencapai situasi kemandirian pangan, selain itu Peshawar-kai isladan pertanian yang berkelanjutan dengan tujuan yang sama dengan JICA. Pemberian bantuan pangan oleh lembaga terkait di Jepang lebih mengutamakan pada perbaikan infrastruktur pertanian yang ada di Afghanistan seperti yang dilakukan oleh Peshawar-kai, membuat bantuan berdampak jangka panjang dan membantu masyarakat lokal mencapai kemandirian pangan sebab mereka melibatkan seluruh elemen masyarakat. Meskipun



begitu, isu keamanan dan politik yang masih terjadi di Afghanistan menjadi pembatas dalam pelaksanaan program secara luas.

Jenis bantuan yang diberikan Jepang tidak hanya menangani persoalan kelaparan yang dihadapi, tetapi mencakup perbaikan infrastruktur pertanian bersama masyarakat lokal membuat bantuan yang diberikan berdampak jangka panjang bagi keamanan pangan di sana. Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Jepang dalam penyaluran bantuannya sejalan dengan apa yang disampaikan *capability approach*, bahwa setiap individu memiliki kualitas dan nilai dalam menjalani kehidupan mereka. Melalui pendekatan ini, bantuan yang diberikan oleh Jepang dapat dilihat bahwa kesempatan untuk membiarkan para masyarakat melakukan usaha dalam menghasilkan pangan berdampak jangka panjang dibandingkan bantuan pangan langsung (Bridges, 2023). Dampak dari bantuan Jepang tidak hanya menangani krisis pangan pada rumah tangga di Afghanistan, tetapi memperluas kapabilitas masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan budidaya agrikultur yang mereka lakukan. Melalui *capability approach* dapat di analisis bahwa pelibatan masyarakat dalam pemulihan agrikultur Afghanistan akan membawa pada situasi yang lebih stabil dan membuat masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan fungsi yang lebih terhormat.

Berbeda dengan *capability approach*, teori dependensi sendiri melihat bantuan internasional sebagai sebuah produk yang dikembangkan negara-negara *core* untuk membuat para negara *periphery* ketergantungan. Salah satu hambatan yang dirasakan oleh WFP dalam penyaluran bantuan adalah kuantitas dari para pendonor yang inkonsisten membuat bantuan yang diberikan sering kali tidak memenuhi tujuan dari organisasi internasional itu sendiri. Teori dependensi mengemukakan bahwa dominasi oleh negara *core* akan membentuk hubungan internal pada negara *periphery* yang akhirnya berhenti pada situasi ketergantungan (Newman, 2024). Berdasarkan teori ini, bantuan pangan yang diberikan kepada Afghanistan bukan sekedar aksi kemanusiaan melainkan sarana untuk mempertahankan dominasi negara-negara pemberi bantuan. Melalui teori yang sama juga, bantuan pangan yang diberikan oleh organisasi internasional hanya menghambat daya saing masyarakat lokal akibat bantuan pangan langsung yang terus-terusan diberikan, sehingga ketergantungan Afghanistan pada bantuan internasional akan semakin kuat.

Upaya Kemandirian Pangan Afghanistan

Melihat situasi krisis pangan di negara sendiri yang sudah mencapai titik mengkhawatirkan membuat masyarakat lokal dan pemerintah Afghanistan yang saat ini ditangani oleh Taliban mengeluarkan upaya-upaya Afganistan dalam mengembalikan keamanan pangan. Sebagai salah satu negara agrikultur, Afghanistan memanfaatkan produksi buah untuk meningkatkan ekonomi domestik melalui ekspor buah jeruk, hal ini membuat mereka menduduki posisi ke-75 sebagai negara pengekspor buah jeruk terbesar di dunia (Hidayat, 2025). Sehingga, pendapatan dari ekspor tersebut dapat dipergunakan dalam memperbaiki kondisi pangan di Afghanistan. Selain itu, ketika masa covid-19 pemerintah Afghanistan melakukan pencegahan terhadap peningkatan krisis pangan melalui alokasi dana pada Kementerian Pertanian, Irigasi dan Peternakan yang kemudian digunakan untuk membeli gandum dari asosiasi petani lokal.

Upaya kemandirian pangan yang dilakukan Afghanistan, melalui lensa *capability approach* merefleksikan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintahan dalam memperkokoh kemandirian pangan. Berdasarkan pendekatan yang sama juga menunjukkan bagaimana kemampuan individu atau masyarakat menjadi penentu keberhasilan pada potensi yang dimiliki. Selaras dengan kemampuan masyarakat yang



diaplikasikan pada apa yang dimiliki, teori dependensi memandang upaya kemandirian pangan di Afghanistan sebagai upaya keluar dari ketergantungan bantuan. Meskipun kompleksitas krisis pangan yang dihadapi Afghanistan dipengaruhi oleh berbagai faktor, negara tersebut masih menunjukkan upaya domestik untuk mencapai kemandirian pangan. Dengan mengoptimalkan potensi agrikultur yang dimiliki dan memperkuat peran kementerian, Afghanistan telah menunjukkan upaya dalam merekonstruksi keamanan pangan berkelanjutan agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional.

SIMPULAN

Krisis pangan di Afghanistan merupakan fenomena yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketergantungan terhadap bantuan internasional, yang disertai oleh kepentingan politik, memperburuk ketergantungan struktural yang menghambat pembangunan kemandirian pangan di negara tersebut. Sistem keamanan pangan domestik yang lemah, ditambah dengan kebijakan represif yang membatasi hak-hak dasar masyarakat, terutama perempuan, semakin memperburuk situasi. Teori dependensi menunjukkan bahwa hubungan antara Afghanistan sebagai negara periferal dan negara-negara donor menciptakan struktur ketergantungan yang tidak mendukung pembangunan kemandirian yang berkelanjutan. Namun, meskipun tantangan yang ada sangat besar, terdapat tanda-tanda positif melalui upaya domestik yang dilakukan oleh sektor pertanian dan kementerian terkait dalam memperkuat produksi pangan lokal.

Bantuan berbasis komunitas yang melibatkan organisasi non-pemerintah dan negara seperti Jepang juga menunjukkan potensi yang besar untuk memperkuat kapasitas lokal, yang dapat membuka peluang bagi tercapainya kemandirian pangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, krisis pangan di Afghanistan tidak hanya dapat diselesaikan dengan distribusi bantuan pangan yang lebih efisien, tetapi juga memerlukan perbaikan struktural dalam sistem sosial-politik yang ada. Upaya mencapai kemandirian pangan akan lebih efektif jika Afghanistan dapat menciptakan struktur yang inklusif dan meningkatkan kapabilitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemenuhan hak pangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kemandirian pangan di Afghanistan sangat bergantung pada pembenahan sistemik dari dalam negara serta perluasan kapabilitas masyarakat untuk memenuhi hak dasar atas pangan secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis mengenai ketergantungan bantuan internasional dan pengembangan kapasitas lokal dalam konteks ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Althoff, J. (2019). *Revolution in Central America*. Routledge.
- Arianto, B., & Simatupang, L. (2025). *Konsep Dasar Metoda Studi Kepustakaan*. Borneo Novelty Publishing
- Bridges, S. J. (2023). Conceptualising, evaluating and supporting the development of cosmopolitan values in internationalised higher education: A capabilities approach. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 20(4). <https://doi.org/10.53761/1.20.4.15>
- FAO Organizational Chart. (2024). *Afghanistan: the food security situation is improving, but the crisis is far from over*. <https://www.fao.org/newsroom/detail/afghanistan--the-food-security-situation-is-improving--but-the-crisis-is-far-from-over/en>



- Gul, F., & Sail, E. U. (2023). Women's economic empowerment through agriculture: Analyzing barriers and solutions. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 1–10.
- Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, Moch. I. (2023). Filsafat Dasar dalam Konseling Psikoanalisis: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189–199. <https://doi.org/10.30653/001.202372.266>
- Hakiki, F. (2020). Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human Security di Etiopia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 127–142.
- Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2023). Respons Kebijakan Terhadap Potensi Krisis Pangan Global. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 400–406.
- Hidayat, S. (2025).). Citrus production management to support self-sufficiency in Afghanistan: A case study in Bati Kot district, Nangarhar province. *Economic and Social Research Journal*, 12–26.
- Jafarov, J., & Singh, T. P. (2024). *Harvesting Hunger: The Impact of Opium Ban on Food Security in Afghanistan*.
- Mashal, T., Takano, T., Nakamura, K., Kizuki, M., Hemat, S., Watanabe, M., & Seino, K. (2008). Factors associated with the health and nutritional status of children under 5 years of age in Afghanistan
- Newman, S. J. (2024). Aníbal Quijano's Critical Sociology: From Dependency Theory to Coloniality. *Sociology of Race and Ethnicity*.
- Norwegian Afghanistan Committee. (2024, February 26). *Norwegian Afghanistan Committee Announces Major Food Security Project in Afghanistan Backed by Saudi Fund for Development via Afghanistan Humanitarian Trust Fund (AHTF), managed by the Islamic Development Bank (IsDB)*.
- Osmani, A. A., Ajir, G. M., Karimi, P. A., Madadi, A. K., Mayar, N., Orwig, M., & Benson, C. N. (2024). Mapping gender roles in the wheat value chain of Central Afghanistan: Evaluating roles, constraints, and opportunities. *Gendered Perspectives on International Development*, 1(2021), 115–135. <https://ojs.msupress.org/index.php/GPID/article/view/6501>
- Pherali, T., & Sahar, A. (2018). Learning in the chaos: A political economy analysis of education in Afghanistan. *Research in Comparative and International Education*, 13(2), 239–258. <https://doi.org/10.1177/1745499918781882>
- Poole, N., Echavez, C., & Rowland, D. (2018). Are agriculture and nutrition policies and practice coherent? Stakeholder evidence from Afghanistan. *Food Security*, 10(6), 1577–1601. <https://doi.org/10.1007/s12571-018-0851-y>
- Samim, S. A., Hu, Z., Stepien, S., Amini, S. Y., Rayee, R., Niu, K., & Mgendi, G. (2021). Food insecurity and related factors among farming families in takhar region, afghanistan. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810211>
- Security Council Report. (2025, March). *Afghanistan*. Monthly Forecast.
- United Nations. (2023, July 11). *Experts: Taliban treatment of women may be "gender apartheid."* <https://www.ohchr.org/en/stories/2023/07/experts-taliban-treatment-women-may-be-gender-apartheid>
- USAID. (2022, October 13). *Rooted in Resilience*. <https://medium.com/usaid-2030/rooted-in-resilience-5d53b57be3c3>
- World Food Programme. (2024). *Annual country report 2023: Afghanistan – Country Strategic Plan 2018–2025*. <https://www.wfp.org/publications/afghanistan-annual-country-report-2023>

